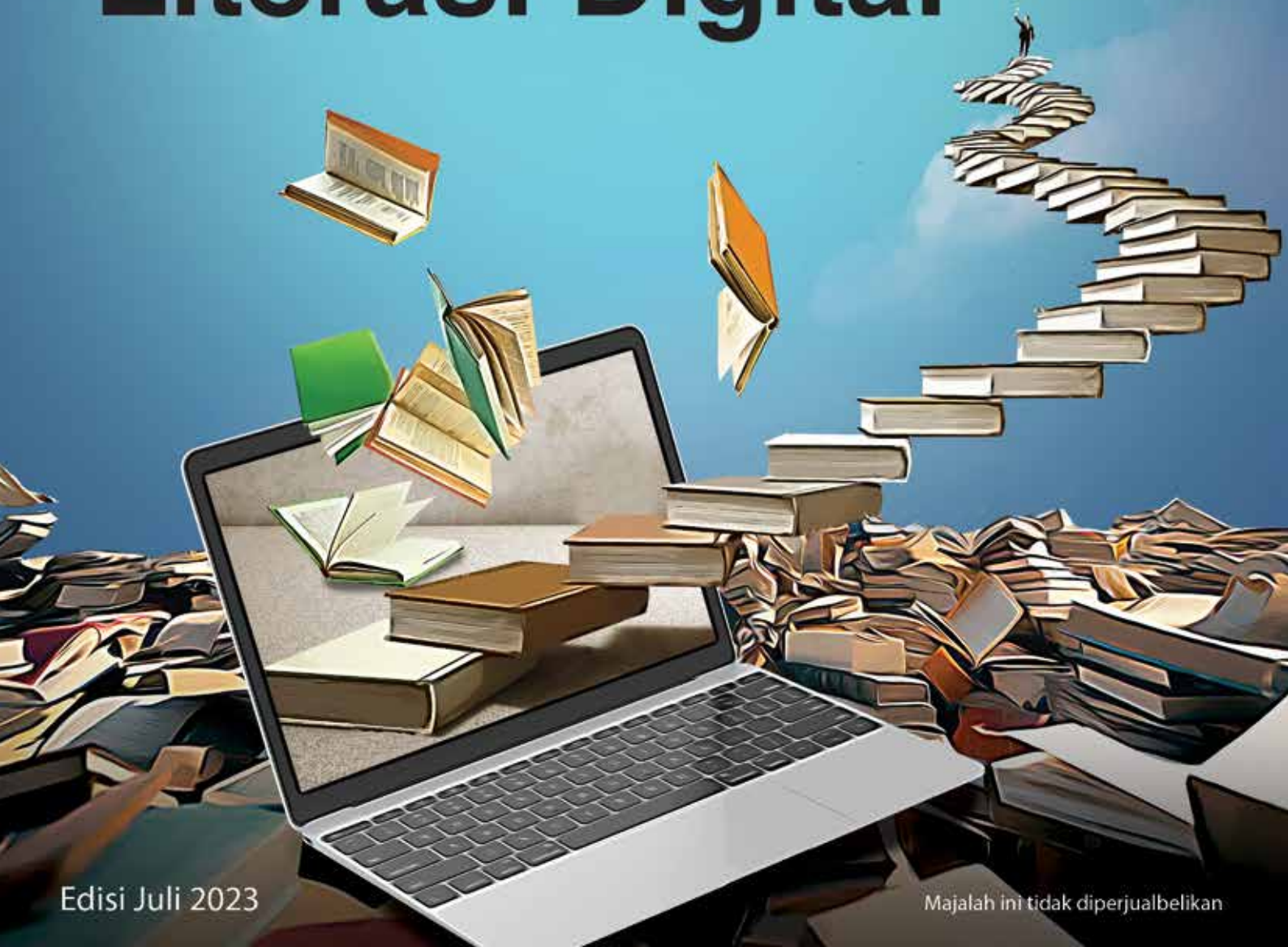




Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

Terapkan Literasi Digital



Sebuah Era



Sebuah era baru tercipta hasil inovasi dari revolusi industri 4.0. Era ini dikenal dengan "Era Society 5.0." Sebuah konsep masyarakat yang dapat menyelesaikan tantangan dan permasalahan sosial melalui pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dengan kecerdasan manusia.

Salah satu produk era tersebut ialah kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) yang diakui banyak membantu kehidupan manusia. Mulai dari hal-hal remeh, hingga mampu menyediakan kode pemrograman (programming) yang rumit. Hampir seluruh masalah dapat ditangani.

Kaitan dengan itu, pada edisi kali ini, redaksi majalah Cirebon Katon menyajikan tema mengenai kearsipan yang dinaungi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon.

Menurut KBBI, arsip adalah dokumen tertulis berupa surat, akta, lisan atau bergambar foto, film dari waktu yang lampau dan disimpan dalam media tulis. Atau sederhananya tempat penyimpanan berkas sebagai cadangan. Biasanya arsip dikeluarkan oleh instansi resmi, dipelihara di tempat khusus.

Sedangkan jika mengacu pada Lembaga Administrasi Negara (LAN), arsip adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, film, mikro film, rekaman suara, gambar peta, bagan, dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya atau salinan serta dengan segala cara penciptaannya.

Semula, arsip hanya dapat dibuat melalui media tulis kertas, namun seiring ditemukannya internet, maka arsip berbasis digital pun muncul. Namun bagaimana dengan kondisi kearsipan Kabupaten Cirebon pada era *society 5.0* saat ini?

Oleh karenanya, kami pun tertarik untuk mengkaji dan mendalaminya. Kami berharap, hasil karya jurnalistik ini dapat mendukung serta memberi informasi bermanfaat bagi khalayak.

Meski demikian, kami sangat menunggu masukan, saran dari segenap pembaca budiman untuk kemajuan dan evaluasi kami.

Beriringan dengan itu, kami segenap jajaran redaksi Majalah Cirebon Katon mengucapkan selamat HUT Bhayangkara Polri ke-77. "Polri Presisi Untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas." Selamat membaca Cirebon Katon!

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Hj Eriati
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

H. Sofwan, S.T
(Ketua Komisi 1)

Pandi, S.E
(Ketua Komisi 2)

Anton Maulana, S.T, M.M
(Ketua Komisi 3)

Aan Setiawan, S.Si
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Sulianingrat
(Kabag Humas, Protokol, Kerjasama, dan Aspirasi)

Nisa Afidah, SH
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Dra. Puti Amanah Sari
(Pj Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Dra. Puti Amanah Sari
(Kasubag Kerjasama dan Aspirasi)

Redaktur :

Yusuf

Reporter :

Supardi • Kustano • Riyan • Amir

Fotografer :

Qushoy

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman

Distribusi :

Firman • Misbah

Korespondensi:

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Compang-Camping Rawat Arsip

6 | Perpustakaan Daerah

Minim Inovasi, Sepi Pengunjung



14 | KILAS

Audiensi Isu Penundaan Pilwu



18 | PUBLIKA

Mohon Tekan Angka Penyebaran IMS



22 | LENSА

Sebatang Kara Pengayuh Becak

24 | PROFIL

Ramdhani, S.T
Gemar Baca Sejak Belia

28 | DINAMIKA

Usulan Kenaikan Anggaran KID
Komisi I: Kita Akan Kaji di Banggar

30 | Komisi III: Pengembang Perumahan Wajib Bantu Perbaikan Jalan

32 | Komisi III Kaji Pengelolaan Sampah di Yogyakarta

34 | Soroti Pelaksanaan PPBD 2023



36 | POTENSI

Urgensi Arsip Digital Demi Kemajuan Cirebon



38 | DESA

Dukuwidara
Komitmen Ciptakan Atlet Muda

Compang-Camping Rawat Arsip

Disarpus prihatin belum semua OPD merawat keberadaan arsip. Tak jarang arsip disimpan di tempat yang tak layak. Mengapa demikian?



Foto: foto: PERIL

Belum hilang dari ingatan, kasus kebakaran sekolah sempat menimpa SD Negeri 1 dan 2 Waledessa pada 2021 silam. Akibat kejadian tersebut, sejumlah ruang kelas dan bangunan pun ludes menyisakan puing-puing.

Tak hanya bangunan yang hancur dilahap si jago merah, sejumlah arsip dan data penting milik sekolah pun hangus terbakar. Dilaporkan, ratusan arsip terdiri dari: ijazah, akta, bukti, rapor, dan dokumen penting lainnya yang tersimpan selama puluhan tahun lenyap.

Peristiwa tersebut pun menggugah keprihatinan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Cirebon. Kepala Disarpus Kabupaten Cirebon Abdullah Subandi mengatakan, arsip fisik, sangat mudah rusak atau hilang jika terjadi bencana tak terduga.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan pengelolaan arsip di Kabupaten Cirebon yang belum dianggap penting. Kebakaran di SD Negeri Waled,

merupakan preseden buruk sekaligus evaluasi betapa pentingnya merawat arsip tidak hanya berbasis fisik. Subandi menilai, arsip masih dipandang sebelah mata.

“Pengelolaan arsip masih dipandang hal tak penting. Saya pernah berkunjung ke salah satu kecamatan, dan menemukan tumpukan dokumen tersimpan di dalam WC bekas yang dijadikan sebagai gudang. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Subandi.

Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pemerintah wajib merawat dan mengelola arsip dengan baik. Hal itu karena peran arsip yang merupakan identitas negara dan sebagai akuntabilitas publik.

“Dalam undang-undang mewajibkan pemerintah untuk mempunyai dan merawat arsip, jika tidak maka akan dikenakan sanksi berupa hukum pidana,” jelasnya.

Kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang tersebut telah diadaptasikan oleh Disarpus



dengan menyediakan Sistem Kearsipan Daerah (SKD). Namun, sampai saat ini tak lebih dari setengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdaftar ke dalam sistem tersebut.

Subandi menyebutkan, dari total 33 OPD, hanya belasan yang sudah mendaftar. Selebihnya belum terdaftar dan tengah disosialisasikan.

Bahkan sebagian OPD menganggap arsip hanya formalitas. Padahal landasan yuridis sudah menegaskan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa. Pengelolaan arsip tidak hanya dalam lingkup pemerintahan saja, tapi juga bagi perusahaan dan organisasi politik.

“Bukan hanya pemerintah, tapi juga lembaga pendidikan, kesehatan, sosial politik seperti KPU, BUMD, perbankan dan juga perseorangan itu wajib punya arsip,” ungkap Subandi.

Setidaknya ada beberapa jenis arsip yang perlu diketahui pemerintah daerah: arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, dan arsip statis.

Selain itu terdapat beberapa arsip yang memiliki dimensi waktu dan masuk ke dalam Jadwal Retensi Arsip (JRA). JRA merupakan daftar jangka waktu penyimpanan arsip hingga berkaitan kapan arsip boleh dimusnahkan.

“Ada arsip yang harus dimusnahkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya arsip dengan jenis

aktif atau inaktif,” ungkapnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 25, arsip yang dimusnahkan memiliki dimensi waktu 10 tahun. Pemusnahan juga berdasarkan rekomendasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Selama ini, Disarpus memiliki 4 depo yang merupakan tempat penyimpanan arsip berbentuk fisik berupa dokumen, seperti sertifikat, dan surat keputusan. Dokumen tersebut meliputi arsip dinamis dan statis.

Depo tersebut belum ditata ulang pasca terjadi pandemi. Bahkan masih banyak depo yang kosong, hal itu disebabkan ada beberapa OPD yang belum mengirim arsip yang seharusnya disimpan di Disarpus.

“Saya juga tidak mengerti kenapa, padahal sudah dijelaskan pada undang-undang. Soalnya, kalau ada pemeriksaan dari pusat pasti larinya ke dinas kearsipan,” keluh Subandi.

Selama ini Disarpus sudah melakukan pembinaan ke setiap OPD atau perusahaan, agar lebih tertib dalam mengelola arsip. Namun, tak jarang pimpinan perusahaan atau instansi mangkir tak dapat ditemui.

“Kadang kalau kami sosialisasi ke pimpinan perusahaan tidak ada. Padahal sebelumnya sudah kami surati. Tak heran Disarpus dicap sebagai dinas buangan,”

Dia menyadari, banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang perlu diselesaikan segera. Ia bertekad agar 33 OPD bisa segera mendaftarkan diri dalam SKD. Sehingga pengawasan pengelolaan arsip bisa lebih mudah.

“Kita memiliki 33 OPD, 40 kecamatan, 424 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut arsipnya masih belum terkelola dengan baik,” pungkasnya. •par

Perpustakaan Daerah Minim Inovasi, Sepi Pengunjung

Dinilai kuno dan tak miliki inovasi, menjadi alasan mengapa keberadaan perpustakaan daerah sepi peminat.



Di awal Mei tahun 2018, Assegaf tak tahu bila hari itu akan menjadi awal ia bergerak dalam ruang literasi. Saat itu ia membaca sebuah berita bertajuk ratusan siswa yang tak bisa menulis dan membaca di Kabupaten Cirebon. Assegaf benar-benar tertarik untuk mengetahui penyebabnya. Ia pun mulai berpikir untuk membagikan bacaan gratis dengan mendatangi anak-anak langsung.

Assegaf mulai merombak sepeda ontel miliknya yang ia beli Rp 400 ribu untuk diubah menjadi perpustakaan berjalan yang ia namakan "Sepeda Pustaka Literasi Pelajar Tegalugubug." Bermadankan belasan buku koleksinya, di akhir pekan, Assegaf mulai berkeliling menuju sekolah, pondok pesantren, maupun halaman rumah-rumah dimana anak-anak berkumpul.

"Pertama kali saya melakukan itu banyak yang mencemooh, tapi saya tidak peduli. Ternyata respon anak-anak luar biasa. Mereka berebut buku bacaan yang saya sediakan. Mereka punya minat baca buku

yang tinggi," ujar pemilik nama lengkap Muhammad Assegaf, menceritakan.

Menurutnya, kehadiran perpustakaan berjalan menjadi jawaban, bila anak-anak tidak semua malas membaca.

"Mereka hanya butuh bahan bacaan yang disediakan. Karena enggak mungkin kalau harus ke perpustakaan daerah yang jauh dan perlu ongkos untuk ke sana," jelasnya.

Terlebih, sarana literasi di Kabupaten Cirebon, kata Assegaf, dinilai kuno sehingga sepi peminat. Menurutnya, perlu inovasi agar keberadaan perpustakaan menjadi menarik untuk dikunjungi.

Ia berpendapat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Cirebon harus lebih memperhatikan perkembangan literasi. Salah satunya dengan merawat dan mengelola perpustakaan daerah dengan ragam program.

Bila hanya mengandalkan pelayanan dan kebersihan tempat saja, belum mampu mendorong

perpustakaan daerah ramai pengunjung. Diperlukan inovasi dan tawaran yang menarik.

"Memang pelayanannya sudah bagus, tapi tetap pengunjungnya sepi. Jadi selain menyediakan tempat, pemkab juga harus punya inovasi," kata Assegaf.

Program sepeda pustakanya telah memberikan kesempatan bagi anak-anak yang ingin membaca tanpa harus ke perpustakaan. Terlebih variasi buku yang dimiliki Assegaf beragam, dari jenis ilmiah hingga fiksi.

Pria yang juga guru di SMP Khas Kempek tersebut, berkomitmen untuk terus mengembangkan program sepeda pustaka, sehingga lahir budaya gemar membaca.

Ia mengibaratkan, buku sebagai jendela ilmu, sementara perpustakaan merupakan sarananya. Maka, jika menginginkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul pemkab perlu serius mengelola perpustakaan.

"Ibaratnya perpustakaan itu kan jendela ilmu, tapi bagaimana jadinya jika jendela ilmu itu sepi pengunjung," jelas laki-laki yang hobi bernyanyi tersebut.

Pentingnya jemput bola oleh pemerintah daerah agar perpustakaan dapat disediakan sejak di tingkat desa dan kecamatan.

Selain itu, dia juga berharap,



Disarpus bisa bekerjasama dengan komunitas literasi di Kabupaten Cirebon melalui program peningkatan minat baca.

"Saran saya dukung dan maksimalkan program komunitas-komunitas seperti perpustakaan bergerak, karena perpustakaan bergerak memiliki karakter jemput bola ke daerah-daerah. Jadi jika ada dukungan dari pemerintah ruang komunitas juga lebih luas," tandasnya.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Kadisarpus) Kabupaten Cirebon Abdullah Subandi mengakui bila perpustakaan bagi para pelajar di Kabupaten Cirebon sangat dibutuhkan.

Meski demikian, Subandi mengklaim, Disarpus telah melakukan perawatan dan pem-

binaan terhadap perpustakaan daerah. "Perpustakaan ini sudah kami pastikan selalu terawat. Karena perpustakaan bisa berguna untuk mencerdaskan bangsa dan membangun pendidikan anak-anak," ujarnya.

Namun ia tak menampik, jika pengunjung perpustakaan milik daerah sepi pengunjung. Menurutnya hal itu disebabkan minat baca di Kabupaten Cirebon yang dinilai rendah. Alhasil keberadaan perpustakaan bak mati suri.

Saat ini, Disarpus hanya fokus pada bidang perawatan perpustakaan agar buku-buku tetap terjaga dengan baik.

Jika melihat kebutuhan pembaca, Subandi juga berharap perpustakaan bisa tersedia sejak dari tingkat desa dan kecamatan. Hal itu agar anak-anak bisa menikmati buku tanpa harus ke perpustakaan daerah.

Oleh karenanya, Subandi menuturkan, perlunya kerjasama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Cirebon untuk mempublikasikan dan mengajak masyarakat mendatangi perpustakaan.

"Kalau hanya kita tentu tidak bisa. Harus bareng-bareng. Apalagi kalau harus ada perpustakaan sejak dari desa, tentu harus ada dorongan dari eksekutif dan legislatif," pungkas Subandi. •Par



Naik Level Digitalisasi Kearsipan

Disarpus diminta untuk seriusi digitalisasi kearsipan. Sofwan juga meminta bupati mengeluarkan regulasi turunan undang-undang.



Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur, penyelenggaraan kearsipan menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan kabupaten/kota. Secara eksplisit, lembaga kearsipan harus memastikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan kearsipan.

Namun jauh panggang dari api, Disarpus Kabupaten Cirebon melaporkan, belum semua SKPD Kabupaten Cirebon telah menyerahkan arsip melalui Disarpus. Bahkan tak sedikit, yang justru hanya menyimpan arsip di gudang bekas.

Hal itu pun mendapat perhatian Budayawan Cirebon Raden Chaidir Susilaningrat. Ia menilai, bila keberadaan Disarpus Kabupaten Cirebon belum terlalu eksis. Bahkan masyarakat Cirebon dipastikan tidak mengetahui apa programnya.

"Ini jangankan masyarakat, boleh jadi organisasi perangkat daerah (OPD) pun tidak tahu programnya selama ini apa," ujarnya.

Padahal, keberadaan arsip merupakan salah satu indikator kemajuan daerah. Chaidir mengungkapkan, pengalamannya turut terlibat dalam menyusun sejarah Pemerintah Kabupaten Cirebon hingga 4 jilid, di mana data diperoleh dari arsip yang ada di provinsi dan nasional.

Berkat penelitian itu, perjalanan panjang Pemerintahan Kabupaten Cirebon era dahulu pun, terungkap dan terdokumentasi.

"Kita bisa mengetahui bupati-bupati sejak zaman Belanda itu siapa saja karena arsip. Apa saja yang mereka lakukan, dan pembangunan apa saja yang mereka berhasil diwujudkan. Bila melihat dari awal mula pemerintahan, Kabupaten Cirebon berusia cukup lama sekitar 200 tahun atau sejak 1800 Masehi. Makanya sangat ironi kalau arsip itu tidak dikelola baik," jelas Chaidir.

Namun demikian, Chadir menuturkan, tugas dan fungsi Disarpus bukan hanya tentang menyimpan arsip, melainkan, harus mampu memberikan



edukasi kepada seluruh elemen. Secara tidak langsung, belum tertibnya pengelolaan arsip di OPD, juga dipengaruhi ketidak tahuan mereka terhadap tugas dan fungsi Disarpus.

"Saya tidak menyalahkan dinas, tetapi muaranya kepada segenap *stakeholder* pemangku kebijakan. Dalam hal ini Bupati dan DPRD sejauh mana membuat regulasi tentang pentingnya arsip," jelasnya.

Pria yang juga ketua komunitas budaya Kendi Pertula itu menganggap, Disarpus semestinya intens menyosialisasikan dan mengedukasi dengan berinovasi agar masyarakat menjadi tahu dan menjadi senang dengan urusan kearsipan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan ST menerangkan, kewajiban pengelolaan arsip sudah diatur melalui regulasi. Sehingga sudah keharusan jika arsip semestinya disimpan dan dirawat.

"Dalam Undang-Undang No-

mor 43 Tahun 2009 sudah sangat jelas. Semua dinas, dan organisasi memang wajib menyimpan arsip. Dan itu harus dilaksanakan," terang Sofwan.

Dia menegaskan, Disarpus memiliki tugas untuk mengumpulkan dan merawat arsip seluruh lembaga, baik itu pemerintahan, pendidikan, kesehatan, bahkan perorangan.

Politisi fraksi Gerindra itu mengakui, masih banyak arsip-arsip di SKPD yang belum terkumpul, sehingga diperlukan kesadaran.

"Memang kendalanya masih banyak arsip di SKPD, meskipun itu menjadi PR Disarpus, tapi SKPD juga perlu memiliki kesadaran menyerahkan arsip ke Disarpus," ungkap Sofwan.

Ia pun menyayangkan, tumpukan arsip di salah satu kantor kecamatan yang disimpan di gudang bekas. Bila tidak segera diserahkan ke lembaga arsip, semua dokumen resisten hilang. Arsip yang merupakan dokumen negara, kata Sof-

wan, sudah seharusnya ditata dan mendapatkan perawatan khusus. Terutama arsip fisik yang berisiko hilang dan rusak.

"Ketika arsip belum digitalisasi sangat rawan hilang. Salah satu faktornya jika ada peristiwa tak terduga seperti bencana banjir atau kebakaran. Kalau sudah hilang, butuh waktu lama untuk mengembalikannya," ujarnya.

Sofwan menyarankan, agar kepala daerah turun tangan menginisiasi regulasi untuk meminta seluruh SKPD maupun lembaga swasta menjaga dan merawat arsip.

"Sebenarnya, dinas kearsipan itu sejajar dengan SKPD lain. Maka harus ada kebijakan dan upaya dari bupati yang bersifat instruktif menertibkan administrasi kearsipan," jelasnya.

Kebijakan tersebut, akan menjadi landasan hukum yang kuat sebagai turunan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009.

Sofwan juga menghimbau, agar seluruh OPD mulai mengalihkan arsip fisik ke sistem digital. Digitalisasi kearsipan bukan lagi hanya solusi, tapi sudah wajib direalisasikan.

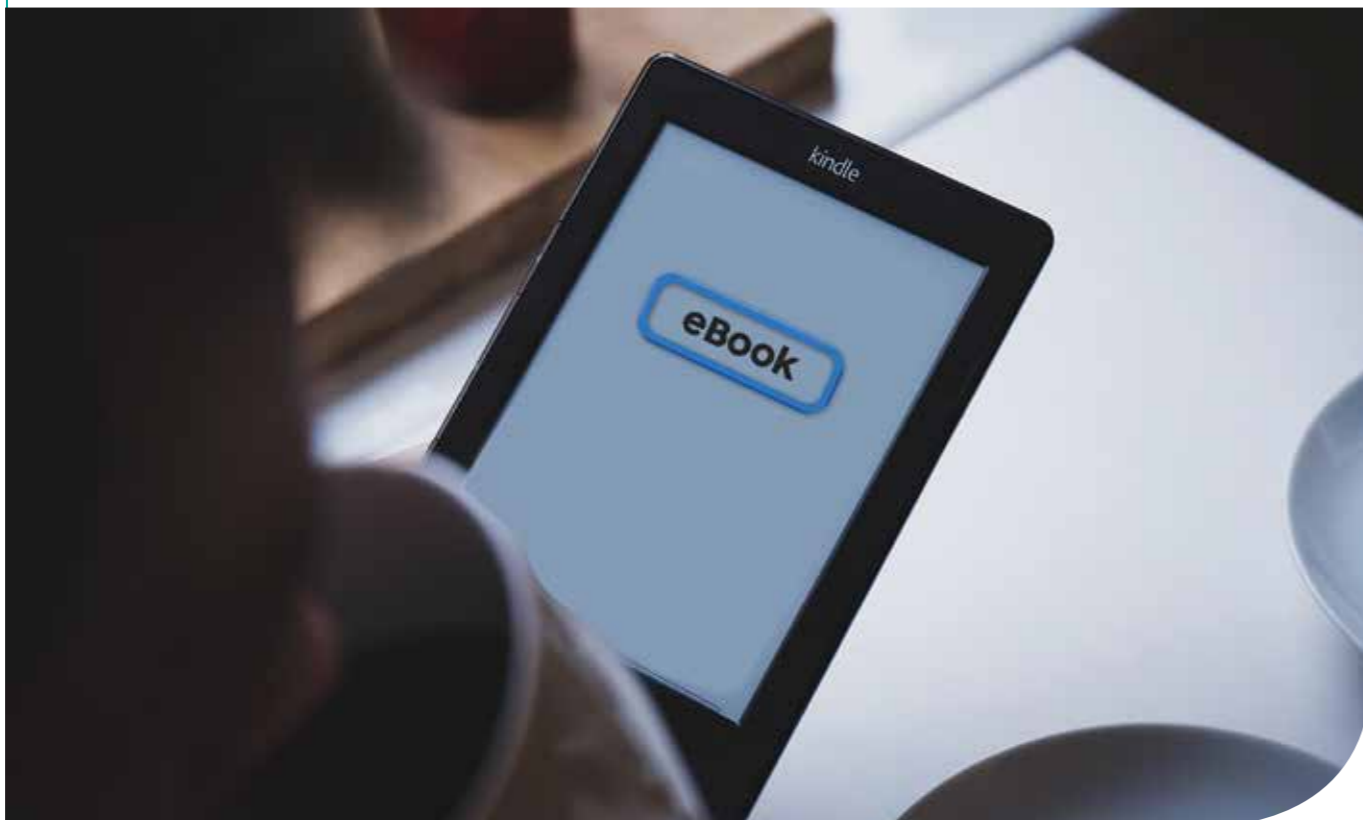
"Kita naikkan level administrasi ke digital. Sehingga kami di Komisi I, juga akan mudah mengawasi kearsipan," tegas Sofwan.

Oleh karenanya, sebelum melangkah ke sistem digitalisasi, Disarpus perlu menyiapkan SDM yang memahami teknologi dan informatika. Seiring berkembangnya zaman, menuntut semua orang untuk terus mengimbangnya, tak terkecuali lembaga pemerintahan.

"Kalau mau serius, langkah nyata Disarpus kita tunggu untuk segera lakukan digitalisasi kearsipan. Dan itu harus dibarengi dengan regulasi turunan," tandasnya. •Par

Disarpus: Tahun Depan Arsip dan Buku Dialihmediakan

Mengatasi kehilangan dan kerusakan arsip, Disarpus bakal mengalihmediakan buku-buku dan arsip hingga rencana dirikan mal arsip. Seperti apa?



Kepala Disarpus Kabupaten Cirebon Abdullah Subandi menargetkan di tahun 2024, seluruh arsip organisasi perangkat daerah (OPD) akan diserahkan Disarpus. Oleh karenanya, Disarpus akan intens melakukan pembinaan kepada OPD berkaitan kearsipan.

Sosialisasi tersebut dimulai pada Agustus 2023. Subandi berharap, seluruh SKPD dan lembaga swasta mulai terbangun kesadaran untuk mengelola arsip.

“Setiap Selasa dan Kamis, kami turun menyosialisasikan. Kemarin sudah kita lakukan di RS Waled, karena mendapat laporan kesulitan mencari data pasien asuransi,” jelasnya.

Sosialisasi tersebut, juga merupakan bentuk upaya Disarpus memaksimalkan OPD yang belum menyerahkan salinan arsip. Subandi berkomitmen, program pembinaan akan terus berjalan hingga seluruh arsip OPD terinput ke dalam Sistem Kearsipan Daerah (SKD). Sehingga cita-cita digitalisasi arsip bisa terwujud.

Selain itu, Disarpus akan memastikan digitalisasi kearsipan dan perpustakaan. Subandi berencana membuat e-book berisi buku dan arsip.

“Memang di google play sudah ada e-book, tapi kita akan sediakan menunya seputar Cirebon, dari pemerintahan, budaya, kuliner hingga sejarahnya,” ungkap Subandi.



Hal itu juga merupakan bentuk upaya Disarpus mendorong peningkatan minat baca tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.

“Jadi menumbuhkan minat baca dari kecil juga perlu, jangan hanya dibiarkan sembarang main gawai saja. Dan tugas kami adalah memfasilitasi sarannya,” terang Subandi.

Sementara mengenai digitalisasi kearsipan, Disarpus masih menunggu pemerintah pusat meluncurkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). “Kalau aplikasi memang akan terintegrasi dengan pemerintah pusat di tahun 2024 mendatang. Jadi kita tidak perlu membuat aplikasi lagi,” kata Subandi.

Namun sebelum memakai aplikasi tersebut, seluruh arsip harus terinput ke dalam SKD. Sementara

untuk digitalisasi internal, Subandi berencana akan membentuk mal arsip yang dilengkapi dengan sistem barcode.

“Rencananya di 5 tahun nanti, kami ingin membuat gudang arsip atau depo arsip seperti mal. Depo tersebut akan menata arsip setiap lembaga dan SKPD. Proses aksesnya menggunakan barcode,” ungkap Subandi.

Untuk mengantisipasi kehilangan arsip, Disarpus juga bekerjasama dengan BSSN (badan siber dan sandi nasional). Sehingga bila arsip hilang, bisa dicetak ulang fisiknya.

Di sisi lain, Disarpus terus menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang memiliki arsip maupun naskah kuno untuk diserahkan.

“Jadi naskah kuno itu kan kalau di UU Nomor 43 tahun 2007 cetak, tulisan dan sebagainya

yang usianya minimal 50 tahun dan manfaat berguna bagi nusa dan bangsa serta masyarakat. Ngga harus tulisan sih, salah satunya bisa saja resep-resep masakan yang kuno jaman dulu yang 50 tahun usianya terus yang pakai bahasa apa, itu bisa dialihmediakan,” jelasnya.

Sebagaimana hasil diskusi dengan budayawan, sejarawan dan pegiat literasi ternyata naskah kuno di Kabupaten Cirebon cukup banyak. Namun masih tersimpan perorangan. Mengingat pada zaman dahulu, ternyata para pejabat keraton Cirebon banyak yang keluar dan bermukim di Kabupaten Cirebon.

“Ini tahun pertama sebagai langkah awal nantinya secara bertahap akan ditindak lanjuti dengan pendataan, pemetaan bersama budayawan, sejarawan, pegiat literasi dan mahasiswa,” ujar Subandi.

Subandi berharap, masyarakat mulai teredukasi mengenai naskah kuno maupun arsip yang harus dilestarikan dan diperhatikan dengan baik. Mengingat selama ini terkadang masyarakat enggan untuk menyerahkan kepada negara.

Menanggapi itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan mendukung langkah Disarpus. Sofwan mengatakan, pengelolaan kearsipan membutuhkan waktu yang panjang.

Namun ia menghimbau, digitalisasi kearsipan maupun perpustakaan, bukan berarti menghilangkan arsip fisik. Arsip fisik akan tetap dibutuhkan untuk beberapa hal.

“Adanya digitalisasi bukan berarti arsip fisik tidak perlu, tapi akan tetap perlu untuk beberapa kebutuhan seperti riset dan bukti,” jelas Sofwan.

Oleh karenanya, rencana



pendirian mal arsip, maupun digitalisasi buku, harus didukung dengan kebijakan kepala daerah.

“Jangan sampai Disarpus hanya berjalan sendirian, dan tidak didukung bupati,” kata Sofwan.

Seperti diketahui, berdasarkan rapat Badan Anggaran (Banggar), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah mendapatkan total pagu anggaran senilai Rp 2,7 miliar atau Rp 2.799.937.455.00: terdiri dari urusan perpustakaan Rp 522.173.300, urusan kearsipan Rp 717.986.200 dan non urusan Rp 1.559.777.950.

Sementara prioritas program, Disarpus akan melaksanakan digital arsip untuk pengadaan alat

scanner over head beserta komputer dan pendukung lainnya sebagai penunjang digitalisasi arsip. Selain itu, terdapat program literasi generasi milenial untuk menunjang layanan perpustakaan daerah semakin diminati.

Anggota Banggar DPRD Kabupaten Raden Hasan Basori mendukung penuh upaya Disarpus menargetkan digitalisasi arsip maupun program peningkatan perpustakaan. Menurut politisi PKB itu, Disarpus harus segera berbenah agar keberadaannya bisa eksis dan benar-benar terasa.

“Belum lama, Disarpus rapat dengan Banggar, saya pun mendengar keluhan dan harapan mereka di mana masih banyak OPD maupun lembaga swasta belum tertib administrasi.

Mereka pun bakal intens sosialisasikan. Pada intinya kami sangat dukung langkah nyata itu melalui afirmasi kebutuhan anggaran,” ujar Hasan.

Meski demikian, Hasan mengingatkan, agar Disarpus dapat memastikan program di tahun mendatang terukur dan menjawab persoalan kondisi arsip dan perpustakaan saat ini. Selain itu, peningkatan minat baca juga harus menjadi pekerjaan rumah bagi Disarpus.

“Kalau kita lihat, Kota Cirebon saja sudah punya program digitalisasi arsip, kita gak boleh kalah. Dan itu yang harus dipikirkan, bagaimana Disarpus juga bisa berinovasi. Juga bagaimana agar perpustakaan dan kantor arsip diminati pengunjung,” jelas Hasan. •Par

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Audiensi Isu Penundaan Pilwu

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon H Sofwan, ST menerima audiensi dari sejumlah perwakilan bakal calon (balon) kuwu yang akan mengikuti Pilwu pada Oktober 2023 mendatang. Pada kesempatan itu, para balon kuwu meminta kejelasan sikap DPRD Kabupaten Cirebon mengenai isu penundaan Pilwu akibat Undang-Undang (UU) Desa yang bakal direvisi.

Menanggapi itu, Sofwan menegaskan, Pilwu

serentak 2023 tetap berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah diagendakan. Politisi Partai Gerindra tersebut juga mengimbau, agar seluruh pihak termasuk pejabat pemerintah tidak berasumsi soal Pilwu tanpa dasar yang berakibat konfrontasi di tengah masyarakat.

"Pada prinsipnya kami berharap kondusifitas menjelang Pilwu tetap terjaga. Dan kami minta agar tidak ada lagi pihak-pihak yang mengeluarkan statemen tanpa dasar yang belum jelas," tegas Sofwan.



foto: foto: amir/dk

Soroti Pengadaan Antropometri Dinkes

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon melaksanakan rapat kerja dengan Dinas kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta Inspektorat. Rapat tersebut digelar guna mendengar penjelasan dari Dinkes mengenai pengadaan antropometri senilai Rp 22 miliar.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan mengatakan, pengadaan antropometri melelan anggaran yang tak sedikit. Sehingga perlu

transparansi pemenang tender tersebut. Ia juga meminta agar Inspektorat turut mengawasinya.

"Tadi dijelaskan pada 24 Mei 2023 lalu Dinkes sudah memilih pemenang tendernya. Cuma saya tidak tahu apakah ada kunjungan ke pihak pemenang tender ini atau tidak. Tadi jawabannya agak sedikit ngambang. Ditanya pabriknya di mana agak sedikit ragu-ragu? Kita ingin transparansi karena ini nilai yang besar," kata Aan.



Paripurna Kebijakan Umum Anggaran 2024

DPRD Kabupaten Cirebon menggelar paripurna hantaran bupati terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2024.

Paripurna tersebut dihadiri pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta Forkopimda.

Dalam pembahasan KU PPAS, beberapa poin penting disampaikan Bupati Cirebon Imron.

Imron mengatakan, kebijakan umum anggaran di tahun 2024 masih mengacu pada prioritas pekerjaan rumah Kabupaten Cirebon antara lain, d peningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastuktur jalan, serta penanggulangan kemiskinan.



foto: foto: amir/ck

Monitoring Layanan Kesehatan Masyarakat

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina mengunjungi Posyandu dan Posbindu, di Desa Kecomberan Kecamatan Talun untuk memonitoring layanan kesehatan. Dalam kunjungannya, Siska membagikan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk Posyandu maupun Posbindu, serta berdiskusi dengan masyarakat dan petugas kesehatan.

Siska mengaku prihatin, dengan layanan pusat kesehatan masyarakat yang kurang mendapat dukungan, serta perhatian Dinas Kesehatan Ka-

bupaten Cirebon. Misalnya, minimnya ata kelengkapan untuk cek kesehatan. Karenanya, ia berjanji akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinkes.

"Saya cek ke beberapa Posyandu alat timbang dan ukur badan bayi masih sangat memprihatinkan. Ditambah alokasi anggaran PMT yang hanya disuplai dari desa. Untuk PMT Posbindu malah belum ada anggarannya. Jelas ini harus jadi perhatian serius Dinas Kesehatan," tegasnya.



Mohon Tekan Angka Penyebaran IMS

Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) masih menjadi persoalan kesehatan serius bagi Kabupaten Cirebon. Sepanjang 2023, tercatat sebanyak 83 warga, terjangkit penyakit Sifilis atau dikenal penyakit Raja Singa. Dari 83 kasus tersebut, kasus tertinggi didominasi kelompok Lelaki Seks Lelaki (LSL).

Sifilis adalah penyakit IMS yang disebabkan oleh bakteri *Treponema Pallidum*, dan menjadi salah satu penyakit yang menyerang cukup banyak masyarakat di Indonesia selama 2022. Melihat kasus yang terjadi di setiap tahunnya, kiranya lembaga Legislatif atau Pemkab Cirebon perlu melakukan upaya serius untuk menekan laju penyebaran penyakit tersebut, terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Sofiatun/Mahasiswa/Pasaleman)



Sulitnya Lowongan Pekerjaan

Assalamu'alaikum wr wb.

Bapak/Ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan saya Fitria (21) asal Desa Gempol. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ingin mengeluhkan minimnya lowongan kerja di Kabupaten Cirebon. Hingga saat ini, masih ada sekitar 47 ribu warga Kabupaten Cirebon yang masih menganggur.

Meski jumlahnya sudah berkurang lebih dari 50 % dibanding tahun lalu, akan tetapi angka tersebut masih relatif tinggi. Kita tahu, jumlah perusahaan di Kabupaten Cirebon mencapai 3.255, namun faktanya, hanya beberapa perusahaan saja yang memberi peluang kerja.

Saya harap upaya pemerintah lebih konkret untuk terus mendorong lapangan pekerjaan terbuka lebar.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Fitria/Mahasiswa/Gempol)

Puluhan Hektare Sawah Kekeringan

Salam hormat bapak/ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon, saya Yusuf (40) asal Desa Suranenggala Kidul. Ijinkan saya melaporkan kondisi lahan persawahan di desa kami yang saat ini dilanda kekeringan. Lahan sawah di area tersebut tampak retak-retak. Menandakan sudah lama tidak dialiri air.

Saat kemarau tiba, petani harus berjuang ekstra agar tanaman padi itu bisa dipanen. Sementara elevasi tanah di lokasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan sawah sekitarnya, sehingga rawan terjadi kekeringan ketika kemarau. Kami berharap, bapak/ibu dewan dapat memberikan solusi guna mengatasi kondisi tersebut, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Yusuf/Petani/Suranenggala)



Stadion Watubelah Kapan Rampung?

Stadion Watubelah sebagai salah satu sarana olahraga yang sangat didambakan masyarakat Kabupaten Cirebon hingga kini belum dapat digunakan. Hal itu karena pembangunan berhenti. Tapi yang jelas, hingga hari ini belum terlihat progres stadion megah itu.

Stadion Watubelah mulai dibangun pada 2012 silam, namun hingga memasuki tahun 2023, pembangunan stadion yang digadang-gadang akan menjadi yang terbesar di wilayah Kabupaten Cirebon belum juga rampung.

Menurut saya, Pemerintah wajib memberi kepastian kepada warganya kapan sarana olahraga tersebut bisa selesai. Karena saya yakin, jika sarana tersebut sudah memadai, bukan tidak mungkin akan menjadi magnet even besar olahraga yang akhirnya meningkatkan prestasi.

(Egi/Wiraswasta/Kedawung)

Garam Rakyat Jadi Kosmetik Bernilai

Keberhasilannya menyulap garam rakyat menjadi produk kosmetik bernilai, membuat Septi didapuk sebagai wanita inspiratif.



foto: foto: dok pribadi

Hati Septi tergerak, saat mengetahui harga garam tak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. “Saat itu harga jual garam cuman Rp 300 rupiah per kilo, saya jadi miris,” ujarnya mengawali pertemuan.

Septi sempat bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon dan pernah menjadi tim survei program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar) pada tahun 2008. Tak heran, Septi harus mengamati produksi petambak garam di sepanjang kawasan pantura Cirebon dari Losari

hingga Kapetakan. Melalui pekerjaan itu, Septi banyak mempelajari tata niaga garam.

Septi mulai berpikir bagaimana mengembangkan buih air laut itu lebih bernilai. Di tahun ke 8 bekerja di Dinas Kelautan, Septi menemukan cara mengembangkan garam tanpa konsumsi. Garam yang kaya akan mineral seperti natrium, klor, kalsium, zat besi, ia racik agar menjadi obat perawatan kulit.

“Kandungan di dalam garam sangat bermanfaat sebagai anti-inflamasi yang dapat kencingkan kulit, jerawat, iritasi, serta menyeimbangkan produksi



minyak dan mempertahankan hidrasi. Itu yang jadi awal saya berpikir untuk usaha garam perawatan ini,” ungkap pemilik nama lengkap Septi Ariyani.

Perempuan 43 tahun ini, mulai mengubah *mindset* tentang garam rakyat, yang semula hanya bisa dijual dalam bentuk garam krosok, menjadi garam industri kecantikan bernilai lebih. Menurut Septi, dengan sentuhan teknologi, garam rakyat dapat dikembangkan menjadi produk yang bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan.

Di tahun 2015, Septi akhirnya mendirikan “Rama Shinta Rumah Garam” produk UMKM garam kosmetik. Bak gayung bersambut. Mengusung rancangan konsep produk relaksasi, garam kosmetik Rama Shinta laris di pasaran.

Dalam sebulan, Rumah Garam Shinta berhasil memproduksi garam kesehatan dan kecantikan sebanyak 10 ton. “Proses pembuatannya tergolong sederhana. Saya cuman menyediakan bahan baku garam dicampurkan dengan bahan pelengkap seperti essential oil dan perfume. Jad-

ilah garam kecantikan ini,” jelas perempuan berdarah Yogyakarta dan Cirebon ini.

Saat ini, usahanya telah menghasilkan aneka produk garam kecantikan dan kesehatan antara lain, face scrub, bath salt, body scrub, hair treatment, lulur mandi dan foot salt.

“Produk yang dihasilkan beragam. Ada dalam bentuk souvenir, produk kecantikan dan garam spa. Pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki semua produk garam saya ada,” tuturnya.

Selain itu, Produk Rama Shinta juga sudah memiliki agen dan reseller di beberapa kota. Penjualan produk garam kosmetik ini pun diakui telah menembus mancanegara seperti Turki dan Singapura.

Keberhasilannya mengembangkan nilai tambah garam, membuatnya didapuk penghargaan sebagai wanita inspiratif pada tahun 2016.

Septi optimistis, permintaan produk garam kecantikan akan selalu ada sepanjang tahun. Hal ini seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat modern yang semakin peduli pada perawatan dan kesehatan kulit.

Ia berharap, dengan kehadiran garam kosmetik miliknya, akan mendorong para petani garam mulai berani mendiversifikasi usaha. “Artinya kalau petani garam bisa mengembangkan garam menjadi produk macam-macam, tentu garam yang semula hanya bernilai ratusan perak bisa bernilai jutaan nantinya. Saya berharap demikian,” tandasnya.

Produk Rama Shinta Rumah Garam sudah tersedia di ritel modern maupun *marketplace* seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Untuk harganya ditaksir bervariasi. Dari puluhan hingga ratusan ribu. •Vivi

Sebatang Kara Pengayuh Becak

Pagi itu, Kamsi masih terlelap di becak miliknya. Berteduh di bawah pohon mahoni. Bukan tanpa sebab, pria berusia 63 tahun tersebut masih tertidur. Ia terbiasa beristirahat menjelang pagi di lokasi tersebut.

Meski matahari sudah meninggi, Kamsi belum juga beranjak. Seseekali ia melamun sambil menyalakan rokok tembakaunya. Sambil berharap ada penumpang yang datang.

Melakoni profesi tukang becak di tengah persaingan transportasi modern, tentu tidaklah mudah. Fisiknya yang menua, Kamsi paksakan demi sepiring nasi.

"Kalau diam tentu gak bisa makan. Kalau ada yang nyewa makan, kalau nggak ya ditahan dulu," ucapnya lirih.

Bagi Kamsi, becak satu-satunya teman, harta sekaligus rumah. Di usianya yang semakin senja, ia hanya berharap terus diberikan kesehatan agar tetap bisa bekerja.



Ramdhani, S.T

Gemar Baca Sejak Belia

Kegemarannya membaca diketahui tertanam sejak Ramdhani duduk di bangku SMP. Semula bacaan fiksi belaka hingga artikel olahraga. Bagaimana kisahnya?

Membaca menjadi hal wajib bagi laki-laki satu ini. Seja kecil, ia memiliki hobi membaca. Tak ayal beragam tulisan ia lahap dari ilmiah hingga fiksi.

Adalah Ramdhani, Kepala Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Sebelumnya, Ramdhani terlebih dahulu berkarir di beberapa dinas.

"Sebelum di Sekretariat DPRD saya juga pernah di Sekretariat Daerah (Sekda), Badan Keuangan dan Aset

Daerah (BKAD), kemudian Dinas Lingkungan Hidup. Saya memang suka sekali membaca," ungkapnya.

Tak heran, di saat waktu luang, Ramdhani akan memanfaatkannya untuk membaca koran maupun berita.

Laki-laki berkulit sawo matang itu menyelesaikan pendidikan SD hingga perguruan tinggi di Kabupaten Garut. Di sana pula, Ramdhani pertama kali menemukan hobinya.

Kegemarannya dalam membaca diakui perta-



ma kali saat ia duduk di bangku SMP. Ramdhani sering mengoleksi dan menyukai bacaan fiksi komik.

"Waktu SMP saya sering banget baca komik seperti Kungfu Boy, tapi kalau sekarang lebih banyak baca artikel," ucapnya.

Beranjak dewasa, Ramdhani pun beralih membaca berbagai artikel olahraga. Hampir setiap saat, ia selalu mencari informasi perkembangan olahraga dari dalam dan luar negeri. Hal itu dilakukan, karena Ramdhani menyukai sepak bola dan badminton.

"Paling seru itu saat baca artikel soal sepak bola dan badminton, karena jujur saja saya sendiri suka

dengan kedua olahraga itu. Dulu sering banget main bola," katanya.

Namun, saat ini Ramdhani tak bisa sesering dulu untuk bermain bola dan bulu tangkis karena kesibukannya.

"Kalau sekarang udah enggak kuat. Jarang banget paling ikut main badminton dan sepakbola bareng rekan kerjanya di sini," jelasnya terkekeh.

Pria kelahiran Agustus 1979 itu pun mengakui hanya menjadi fans klub bola saja.

"Saya punya klub favorit Barca atau Bcelona, sementara kalau di sini Persib Bandung," ungkap Ramdhani.

Agar tidak ketinggalan informasi dan perkembangan kedua

klub favoritnya, Ramdhani pun gemar membaca artikel soal olahraga.

Bagi Ramdhani, membaca bukan hanya untuk memanfaatkan waktu luang dengan positif. Namun lebih dari itu. Dengan membaca nalar seseorang dapat berkembang dalam menyikapi persoalan.

Ia juga berpendapat, sebagai makhluk sosial sudah menjadi keharusan memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin dengan melakukan hal yang positif.

"Kita harus bisa memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin, dengan melakukan hal-hal yang positif," kata pria lulusan Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Garut itu.

Meski demikian, Ramdhani belum tertarik untuk menulis. Ia masih konsisten menjadi penikmat tulisan orang lain.

Bekerja membantu tugas legislator, membuat Ramdhani juga harus memiliki pengetahuan yang banyak dan *ter-update*. Jika semula ia hanya membaca perkembangan olahraga, kini Ramdhani diharuskan mengetahui isu pemerintahan dan pengetahuan baru berkaitan tugasnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.

Meski demikian hobi membaca artikel olahraga tetap jadi kesehariannya. Baginya pantang tertinggal informasi mengenai perkembangan olahraga dunia.

Setiap libur bekerja, Ramdhani akan memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk tanggung jawabnya menjadi kepala keluarga.

"Apalagi kalau hari biasa kan saya jarang pulang, Seminggu bisa enggak ada waktu. Makanya kalau libur saya lebih suka habiskan waktu bareng keluaraga saja," pungkasnya. •Par

Hj Tita Budiwati, S Pd Banjir Prestasi, Juara Ramah Anak

Sejak mengawali karir di Kabupaten Cirebon, Tita sudah menuai prestasi. Melalui tangannya, banyak inovasi dan prestasi yang diperoleh SMP Negeri 1 Dukupuntang.

Kepedulian terhadap dunia pendidikan tak membuatnya jauh dari masyarakat. Justru menjadi ruang untuk mengimplimentasikan ilmu yang didapat dari perkuliahan.

“Sebagai guru, kita harus bermasyarakat dan tentu menjadi warga negara yang taat dan patuh kebijakan. Selanjutnya kita juga harus mengambil peran dalam bermasyarakat,” ujar Tita Budiwati, mengawali pertemuan.

Malang melintang di dunia pendidikan adalah gambaran sosok satu ini. Kecintaannya terhadap pendidikan sudah didambakan sejak lulus SMA.

Tita memilih berkuliah di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) atau UPI. Tak butuh lama, selepas menyandang sarjana tahun 1987, Tita diangkat sebagai PNS pada tahun 1988. Jelas, karir yang begitu



melejit ini ia dapatkan berkat kegigihan dan keuletannya.

Ia pun mengawali petualangan sebagai pendidik di SMP N 2 Cisarurup, Kabupaten Garut. Setelah 3 tahun meniti karir, Tita diboyong suami ke Kabupaten Cirebon.

Meski demikian, semangat dan kecintaannya terhadap dunia pendidikan terus bergelora. Setelah pindah ke Cirebon pada tahun 1991, perempuan kelahiran Garut itu mengajar di SMP PGRI Arjawinangun.

Saat itu kondisi SMP PGRI Arjawinangun mengalami kritis karena kesulitan mendapatkan siswa. Hanya belasan siswa yang mau bersekolah di tempat tersebut. Tita tak kehabisan akal. Ia mulai berjibaku mencari formula untuk memecahkan persoalan tersebut.

Beruntungnya Tita sempat aktif di persatuan guru republik Indonesia (PGRI) saat masih di Garut. Ia pun berhasil mening-

katkan jumlah siswa SMP PGRI Arjawinangun. Sejak saat itu, ia pun dipercaya menjadi kepala sekolah di tahun 2007.

Tujuh tahun berselang, Tita dialih tugaskan menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Atap Karang Sembung. Hanya dua tahun berjalan, Tita dipercaya menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Sedong selama 3 tahun. Selanjutnya ia dipercaya untuk memimpin sekolah SMP Negeri 1 Jamblang dan SMPN 2 Jamblang.

Dan saat ini, Tita didapuk sebagai Kepala Sekolah SMP N 1 Dukupuntang sejak 2021. Karirnya sebagai kepala sekolah SMPN 1 Dukupuntang tergolong moncer. Di tangannya, SMP Negeri 1 Dukupuntang banjir prestasi. Salah satunya, keberhasilannya memperoleh juara 1 sekolah ramah anak tingkat kabupaten dan provinsi.

“Alhamdulillah, kami mendapat juara 1 juga sekolah Adiwiyata Nasional. Dan sekarang kami sedang merintis sekolah Adiwiyata mandiri nasional,” ungkap Tita.

Tak hanya itu, SMP Negeri 1 Dukupuntang juga berhasil meraih nominasi sekolah dengan panganan dan jajanan sekolah aman.

Di sisi lain, Tita mengungkapkan, SMP Negeri 1 Dukupuntang juga memiliki program minimalisasi sampah bernama “zero plastik”. Ini adalah program unggulan yang sedang digalakkan. Tita sadar betul untuk mempertahankan semua prestasi dibutuhkan inovasi program.

Untuk menyukseskan program ‘zero plastik’, Tita meminta seluruh siswa agar membawa tepak makan dan botol minuman dari rumah. Dengan begitu, produksi sampah plastik akan berkurang.

Selain itu, Tita juga menyarankan kepada anak didiknya untuk membawa makanan dan minuman dari rumah (bekal) yang disiapkan. Dengan begitu, Tita yakin kesehatan siswa akan terjaga dengan baik.

Tita berharap melalui program tersebut akan menjadi *habbit* (kebiasaan) dan dapat diterapkan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

“Harapan saya, ini tidak hanya menjadi program sekolah, tapi juga harus menjadi *habbit* warga sekolah untuk tetap peduli terhadap lingkungan,” kata dia.

Apa yang dilakukan Tita bukan tanpa alasan. Selama menjadi guru, ia berpegang teguh pentingnya sikap profesional dalam mendidik murid. “Sebagai orang guru, kita juga harus menjaga profesionalitas. Selain itu, kita juga harus menjadi pelopor pergerakan di tengah masyarakat. Dan itu yang saya tekankan untuk civitas SMP N 1 Dukupuntang,” tandas Tita. •Zak

Usulan Kenaikan Anggaran KID

Komisi I: Kita Akan Kaji di Banggar

Idrus meminta peningkatan anggaran KID di tahun 2024 untuk mengoptimalkan seluruh program kerja dan kebutuhan operasional.



Sejak dilantik pada Januari 2022 lalu, Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon periode 2022 – 2026 mengaku belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal tersebut, lantaran anggaran yang diberikan untuk KID sangat terbatas.

“Di tahun awal KID dilantik, kita hanya mendapat anggaran Rp 100 juta dalam setahun. Tentu itu sangat tidak cukup,” ungkap Mohamad Idrus, ketua KID Kabupaten Cirebon saat beraudiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

Di sisi lain, KID memiliki tugas yang tak mudah untuk memastikan informasi dan edukasi kepada publik mengenai kinerja pemerintah daerah, camat, Puskesmas, organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kuwu. Di tahun 2022, KID berhasil membantu Pemkab Cirebon memperoleh predikat “Kabupaten Informatif” se Jawa Barat.

paten Informatif” se Jawa Barat.

Selain itu, KID juga berperan dalam menyelesaikan sengketa informasi. Pada 2022 KID telah menyelesaikan dua sengketa informasi dari sekian banyak laporan yang masuk. “Dari banyak sengketa yang masuk KID hanya bisa menyelesaikan dua sengketa. Selebihnya belum memenuhi syarat,” jelasnya.

Di tahun 2023, KID mendapat anggaran Rp 312 juta. Meski demikian, angka tersebut, kata Idrus, belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan KID. Akibatnya, masih banyak OPD dan kuwu yang tidak mengetahui tugas dan fungsi KID.

“Karena minimnya anggaran yang diterima KID, kita belum maksimal menyosialisasikan tugas dan fungsi kami. Bahkan untuk operasional masih kurang,” ujar Idrus.

Ia pun berharap, di tahun 2024, KID mendapat



dukungan tambahan anggaran yang layak untuk meningkatkan kinerja, melakukan bimtek ke seluruh OPD, kecamatan dan desa dalam menghadapi sengketa informasi.

KID juga berencana melaksanakan bimbingan teknis setiap tiga bulan sekali guna menyampaikan Standar Operasioal Prosedur (SOP) dalam penanga-

nan sengketa.

Idrus juga menargetkan, di tahun 2024, KID mulai memberikan pendampingan bagi seluruh OPD untuk meningkatkan kompetensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Oleh karenanya, KID meminta dukungan dari Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

“Kami juga perlu penunjang

seperti kantor dan mobil operasional agar kegiatan bisa lebih efektif,” tutur Idrus.

Seperti diketahui, dalam rancangan APBD 2024, KID dianggarkan Rp 500 juta. Namun angka tersebut dinilai belum sesuai harapan. Idrus membandingkan dengan kabupaten lain, dimana KID mendapat kucuran anggaran senilai Rp 1 miliar.

“Kalau di Kabupaten Sumpene, anggaran KID sudah Rp 1 miliar lebih. Bahkan di Kota Cirebon yang dekat saja Rp 1,6 miliar. Sementara Kabupaten Cirebon yang menaungi 40 kecamatan hanya Rp 500 juta. Itu masih belum bisa mengcover. Karena 60 persen saja sudah digunakan gaji komisioner,” kata Idrus.

Padahal KID Kabupaten Cirebon merupakan satu dari 5 KID yang ada di pulau Jawa dan nomor 2 di Jawa Barat. Artinya belum semua kota memiliki KID. “Baru di tahun ini KID se Indonesia bakal berkumpul di Sulut dan NTB. Kita akan bahas rencana program kedepan. Pada intinya audiensi kali ini adalah kami menegosiasi agar ada peningkatan anggaran untuk tahun 2024 nanti,” tandas Idrus.

Menjawab hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan berjanji akan membantu KID dalam menyosialisasikan program dan fungsinya ke seluruh OPD. Sementara berkaitan peningkatan anggaran, Opang sapaan akrabnya, akan memperjuangkannya di rapat badan anggaran (Banggar).

“Kalau soal tupoksi KID, kita akan bantu sosialisasikan. Tapi kalau soal anggaran, kantor dan kendaraan operasional nanti saya sampaikan di rapat banggar. Semoga keinginan teman-teman bisa disetujui,” jelas politisi Gerindra itu. •Soy

Perlu Skema Bisnis BUMD Agar PAD Meningkatkan

Hasan menilai, pengelolaan BUMD belum dilakukan secara profesional sehingga belum menghasilkan PAD yang optimal. Apa sarannya?



Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menilai, pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih sangat minim. Padahal potensi BUMD sebagai lumbung pendapatan daerah sangat besar.

"Ini yang kami lihat, jika BUMD belum digarap secara optimal untuk menghasilkan PAD yang maksimal," ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Raden Hasan Basori, saat mengisi talkshow di RCTV.

Oleh karenanya, Komisi II berkomitmen untuk mendorong peningkatan PAD dari BUMD. Sejauh ini BUMD yang sudah berjalan antara lain sektor perbankan dan perusahaan daerah air minum (PDAM).

Hasan menilai Pemerintah Kabupaten Cirebon

belum mendukung penuh permodalan BUMD. Dukungan berupa modal usaha untuk Bank Kabupaten Cirebon (BKC), Bank Jabar Cirebon (BJC) dan PDAM Tirtajati tak sepenuhnya direalisasikan sesuai aturan.

"Dalam Perbup itu, Bank BKC sebagaimana beberapa data yang saya baca seharusnya diberi penyertaan modal Rp 50 miliar, tapi pemerintah baru memberikan Rp 30 miliar. Jadi akses permodalan ini jadi penyebab juga," jelasnya.

Bila melihat segmen pasar, kata Hasan, Kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk 2,3 juta, tentu sangat potensial. Andai saja 60 persen total penduduk misalnya didorong untuk mengakses BKC atau BJC, maka pendapatan akan meningkat. Dan itu yang seharusnya menjadi komitmen bersama



antara pemerintah daerah dan DPRD. Agar potensi perbankan bisa dioptimalkan.

Di sisi lain, BKC, BJC harus berani menawarkan akses permodalan atau *partnership* kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat. "Sehingga BKC dan BCJ bisa bersaing dengan bank swasta atau bank lainnya," kata dia.

Sementara BUMD PDAM, juga tak kalah potensial sebagai sektor pendapatan daerah. Terlebih dengan kehadiran program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mengharuskan masyarakat mengakses air bersih.

Meski demikian, politisi PKB itu melihat, kondisi PDAM saat ini memprihatinkan. Infrastruktur PDAM masih aset lama, sehingga sering kali terjadi kebocoran.

"Kita punya kapasitas air yang cukup tetapi infrastruktur belum menjadi fokus pemerintah daerah. Bagaimanapun juga masyarakat harus terlayani air bersihnya, kualitas airnya sama *continuitas* airnya," jelas Hasan.

Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu berinovasi agar PDAM yang merupakan *Public Services* berbentuk badan bisnis, dikelola secara profesional.

"Kita berharap begitu, wa-

laupun sifatnya pelayanan publik, tetapi ini adalah bisnis yang dikelola profesional. Jadi pemda tetap mendapatkan profit," terangnya.

Hasan menjelaskan, kebutuhan air di Kabupaten Cirebon tergolong tinggi. Terlebih bila kawasan industri Cirebon timur berjalan, tentu kebutuhannya sangat besar. Di satu sisi, tantangannya juga besar kalau sampai pemerintah daerah stagnan dalam mengelola air bersih, maka dipastikan perusahaan swasta air bisa masuk dan akhirnya PDAM akan terpuruk.

Dalam kaca mata bisnis, diperlukan manajerial yang dilakukan oleh internal perusahaan agar layanan PDAM bisa optimal. Selain itu, akses permodalan juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan. "Perusahaan dalam hal ini BUMD harus memiliki strategi bisnis seperti sistem layanan berbasis digital," jelas Hasan.

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon pernah mengunjungi BUMD Kulon Progo, dimana seluruh gaji ASN dibayarkan melalui bank pemerintah daerah. Bahkan penyaluran dana desa juga menggunakan bank daerah.

"Dan tentu mereka punya profit dan permodalan yang kuat juga aset yang besar sehingga bisa memutar dana tersebut," ungkapnya.

Oleh karenanya, Komisi II menargetkan, di akhir tahun 2023, skema bisnis untuk mendukung pembiayaan dan permodalan BUMD bisa terealisasi sehingga akan mulai dijalankan pada 2024 mendatang. "Dan kita harap warga Kabupaten Cirebon bisa melirik bank milik daerah. Kita punya BKC, yang *Insyallah* pelayanannya akan lebih baik," katanya. •soy

Komisi III Kaji Pengelolaan Sampah di Yogyakarta

Anton berharap, hasil kunker di Kota Yogyakarta dan Pemkab Bantul akan menjadi inspirasi bagi pengentasan sampah di Kabupaten Cirebon. Seperti apa?



Sampah menggunung dan berserakan, hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Cirebon.

Hampir seluruh desa di Kabupaten Cirebon memiliki persoalan serupa: minimnya tempat pembuangan sementara (TPS) dan ketidakmampuan mengelola sampah.

Meski upaya pengangkutan sampah menuju tempat pembuangan akhir (TPA) telah dilakukan, namun tidak semua sampah dapat terangkut dan ditampung. Penyebabnya, diakui karena minimnya armada pengangkut dan terbatasnya TPA.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Cirebon pun telah berupaya menambah jumlah TPA dengan membangun TPA Kubangdeleg sebagai

langkah nyata pengentasan sampah di bagian timur.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Cirebon telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah pada akhir 2022 lalu.

Ketua Pansus Perda Pengelolaan Sampah Hj Hanifah mengatakan, kehadiran perda sangat urgen. Mengingat volume sampah di Kabupaten Cirebon yang sudah *over*.

Hanifah menjelaskan, pembahasan Perda sempat ditunda. Sejak 2020 diajukan, baru disahkan tahun 2022. "Karena ada beberapa Perda yang perlu didahulukan, jadi Perda Sampah ini sempat mengalami penundaan," jelasnya.

Ada beberapa poin penting dalam Perda tersebut. Salah satunya mengatur kewajiban Pemda

dalam menangani persoalan sampah, hingga mengelola sampah menjadi sumber energi melalui teknologi.

"Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang lebih asri serta menjadikan sampah sebagai sumber daya aset," tutur politisi PKB itu.

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon pun terus menggali langkah nyata untuk mengentaskan persoalan sampah Kabupaten Cirebon. Minggu 11 Juli 2023, mereka mengunjungi DPRD Kota Yogyakarta dan DPRD Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunker tersebut bertujuan untuk mengkaji penanganan sampah.

Dalam kunjungannya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana mengatakan, Pemkot Yogyakarta dan Pemkab Bantul diakui telah berhasil mengurangi penumpukan sampah.

Seperti diketahui, di tahun 2024 kedepan, Pemkot Yogyakarta akan menyiapkan tempat TPA terpadu dan terbesar dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

"Tempat tersebut tidak hanya sebagai pembuangan akhir namun sampai ke tahap pengelolaan sampah menjadi barang bernilai," ujarnya.

TPA terpadu tersebut, akan memisahkan sampah berdasarkan jenis. Sampah organik akan diproses menjadi pakan magot dan pupuk kompos. Sementara sampah anorganik dipilah dan dijual di tempat daur ulang sampah.

Selain pengelolaan sampah, DPRD Kota Yogyakarta juga menyampaikan, langkah tak kalah penting adalah mengedukasi masyarakat dalam mengelola sampah melalui gerakan



nol sampah anorganik. Melalui kampanye tersebut, masyarakat tidak hanya diminta membuang sampah ke TPS, atau depo sampah, namun mendorong pemilahan sejak dari rumah.

"Dan itu dilakukan secara terus menerus melalui payung hukum Perbup agar masyarakat di sini mau memilah sampah," ungkap Rudiana.

Sementara hasil kunker dari Kabupaten Bantul, diketahui Pemkab memiliki persoalan yang hampir sama dengan Kabupaten Cirebon. Di mana jumlah TPA semakin kritis karena *overload*. Dalam sehari, DLH Kabupaten Ban-

tul melaporkan jumlah sampah mencapai 180 ton.

Sementara untuk menanggulangi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melibatkan kelompok masyarakat sebagai unit pengelola tingkat dasar serta pemanfaatan bank sampah untuk mendorong masyarakat memilah sampah.

Menanggapi itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Anton Maulana akan menindaklanjuti hasil kunker tersebut. "Nanti ini bisa menjadi bahan pertimbangan hasil kunker kita bagi Pemkab Cirebon," pungkas politisi Golkar itu. •Suf

Soroti Pelaksanaan PPDB 2023

Tak sedikit sekolah yang hanya mendapat belasan siswa saat pelaksanaan PPDB 2023. Aan minta Disdik lakukan langkah. Mengapa terjadi?



Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menilai, sekolah yang mendapat siswa kurang dari 20 saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023, disebabkan karena minimnya inovasi dalam menyambut tahun ajaran baru.

Hal itu dikemukakan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan saat menyoroti hasil pelaksanaan PPDB tahun 2023 di Kabupaten Cirebon.

Dirinya mengaku prihatin, saat mendapat informasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mulyasari misalnya, yang hanya mendapatkan 1 siswa pada PPDB 2023. Dan hal itu terjadi di beberapa sekolah. "Saya sebut satu sekolah yang paling miris di Mulyasari, di kecamatan lain juga banyak sekolah yang hanya dapat belasan siswa. Tentu ini sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian bersama," ujar Aan.

Aan mengungkapkan, kurangnya inovasi yang dilakukan lembaga pendidikan disinyalir menjadi salah satu penyebab banyaknya sekolah negeri kurang diminati. Selain itu, minimnya perawatan sarana dan prasarana turut memicu, mengapa para peserta didik baru enggan mempertimbangkan sekolah negeri sebagai pilihan.

"Saya melihat salah satu penyebabnya karena minimnya inovasi yang dilakukan pihak sekolah. Selain itu, performa sekolah tidak enak dipandang dan terkesan kumuh," ungkap Aan,

Selain itu, politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti aspek mutu dan kualitas pendidikan yang masih kurang sehingga perlu lebih ditingkatkan. Pasalnya, ia mendapati sebuah informasi bahwa siswa yang lulus dari sekolah tersebut boleh dikatakan kurang ideal dari sisi karakter.



"Dari kunjungan itu, saya mendapatkan informasi, kenapa tidak diminati? Penyebabnya karena lulusan sekolah tersebut nakal-nakal, akhirnya masyarakat pun enggak mau nyekolahkan di situ," terangnya.

Hal itu menjadi pengingat agar sekolah memperhatikan mutu. Bila mutu pendidikan di sekolah atau citra sekolah buruk tentu para wali murid tidak akan tertarik. Karena sejatinya, lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk membentuk

karakter setiap anak didik menjadi lebih baik.

Ia pun meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon segera menginventarisasi sekolah yang tidak dalam kondisi optimal. Baik dari segi performa maupun sarana prasarana. Tak kalah penting, lanjut Aan, Disdik harus bisa lebih selektif, terutama saat adanya permintaan pembuatan sekolah baru.

Dirinya mengingatkan, proses pembuatan sekolah baru harus benar-benar dikaji dengan



matang. Karena jarak antar sekolah satu dengan lainnya bisa menjadi salah satu penyebab kurangnya partisipasi siswa.

"Pada saat perencanaan, yang mau buat sekolah baru jangan berdekatan dengan sekolah yang sudah ada. Karena bisa jadi, faktor penyebab lainnya karena terlalu banyaknya sekolah baru. Akhirnya ada ketidakseimbangan antar sekolah," terang Aan.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon berjanj akan segera menganalisa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SD Negeri Mulyasari, Kecamatan Losari, yang pada tahun ini hanya menerima 1 orang murid.

Kepala Disdik Kabupaten Cirebon, H Ronianto mengatakan, analisa dilakukan untuk menentukan langkah yang akan ditempuh Disdik dalam persoalan tersebut.

"Kami akan lakukan analisa, langkah apa yang akan dilakukan terkait dengan SD Mulyasari itu. Apakah akan dijadikan kelas jauh apakah merger dengan sekolah lain," kata Ronianto, Senin, 24 Juli 2023.

Menurut Roni sapaannya, opsi paling efektif bisa segera dilakukan adalah dengan dibuat kelas jauh. Nantinya, induk sekolah tetap di SD Negeri Mulyasari, kemudian kelas 1 sampai kelas 2 tetap di kelas SD Negeri Mulyasari, tapi kelas 4 sampai kelas 6 di sekolah lain.

Sementara bila memaksa merger, prosesnya akan lebih lama karena harus dikaji dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu.

"Ini akan jadi evaluasi kami di PPDB tahun mendatang, bagaimana mencegah terjadinya ketidakseimbangan siswa. Agar seluruh sekolah bisa merata," pungkas Roni. •Mir



Raden Chaidir Susilaningrat
Pegiat Komunitas Kendi Pertula

Urgensi Arsip Digital Demi Kemajuan Cirebon



Tak kurang 15 tahun, penulis aktif dalam komunitas budaya bernama Kendi Pertula. Selama itu, penulis telah banyak terlibat dalam pelestarian pusaka dan beragam peninggalan Cirebon. Baik peninggalan berbentuk fisik maupun non fisik. Baik sebuah pusaka yang bersejarah maupun

cagar budaya. Penulis biasa menyebutnya, peninggalan *tangible* (fisik).

Sementara peninggalan *intangible* (non fisik) seperti: petuah dan nasihat. Selama itu pula, penulis bersentuhan dengan arsip dan menjadikannya keharusan. Penulis melihat bahwa Cirebon merupakan salah

satu daerah yang kaya akan peninggalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menjelaskan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan terjaminnya perlindungan kepentingan negara melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip dan adanya jaminan terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan negeri maupun swasta, perusahaan swasta, perseorangan, dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pada masa kolonial misalnya, sebagaimana diketahui dari data arsip nasional, bahwa Cirebon sempat menjadi daerah yang maju pada masa lampau. Sejak tahun 1930, arsip nasional menerangkan, bila masyarakat Cirebon sudah membaca koran. Di masa itu, Cirebon memiliki sebelas surat kabar yang beredar. Uniknya enam di antaranya, surat kabar telah menggunakan 5 bahasa: Belanda, Jawa, Sunda, Melayu dan Inggris.

Surat kabar tersebut disebarluaskan ke seluruh nusantara seperti Batavia hingga Surabaya. Melalui pengalaman tersebut, penulis menilai betapa pentingnya menjaga arsip.

Kemajuan suatu negara salah satu tolok ukurnya, adalah seberapa pentingnya arsip di negara tersebut. Negara-negara maju di Eropa seperti Inggris, Belanda telah berhasil membangun negara, karena mampu mengabadikan arsip sebagai lumbung keilmuan. Salah satu manfaat yang diperoleh dari penjajahan Belanda, Indonesia mengetahui pengelolaan arsip.

Kita mengenal bagaimana cara mengelola arsip sehingga bisa belajar dan mengetahui kondisi masa lalu bukan untuk kembali ke masa lampau, melainkan menatap masa depan. Apakah yang kita tulis hari ini, masih bisa dibaca 500 tahun ke depan? Karena pengetahuan yang diperoleh saat ini tidak terlepas dari arsip 500 tahun silam.

Tidak ada cara lain selain mengoptimalkan arsip dengan merawat dan memilikinya dengan baik. Arsip tak boleh dianggap sepele karena peranannya sangat vital. Sementara pengelolaan arsip di Kabupaten Cirebon jauh panggang dari api.

Meski berbagai sistem telah dibuat oleh Pemerintah Pusat namun belum benar-benar dirasakan

“
Apakah yang kita tulis hari ini, masih bisa dibaca 500 tahun ke depan? Karena pengetahuan yang diperoleh saat ini tidak terlepas dari arsip 500 tahun silam.
”

keefektifannya. Sistem kearsipan harus mampu mengklasifikasi jenis-jenis arsip penting, mana arsip yang aktif atau inaktif.

Arsip ini memegang peran yang sangat penting. Bila Pemkab Cirebon sendiri menganggap arsip itu penting, pada akhirnya masyarakat akan tereduksi.

Ada masyarakat yang sudah 30 tahun berumah tangga saat ditanya surat nikahnya, justru lupa menyimpannya. Artinya masyarakat juga harus dididik untuk bisa memilah mana arsip yang penting dan tidak. Sebagian hanya tahu surat tanah, BPKB, STNK. Bila saja Pemkab Cirebon mampu mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan arsip, bukan tidak mungkin, sebuah arsip baru yang ternyata milik negara bisa ditemukan.

Sebagaimana diketahui, ada beberapa dokumen negara yang justru dipegang oleh keluarga bukan lembaga negara. Kabupaten Cirebon bisa belajar dari beberapa kejadian tentang bagaimana penting dan strategisnya arsip bagi negara.

Memang pengelolaan arsip yang baik membutuhkan biaya yang tinggi. Bagaimana cara membuat arsip itu awet. Bagaimana untuk mengabadikan arsip melalui digitalisasi arsip.

Penulis pernah membantu pemerintah melakukan digitalisasi naskah-naskah kuno berusia 300 tahun, di mana kondisi kertasnya sudah lapuk dan mudah hancur. Agar bisa tetap bisa terbaca, caranya dibuat dokumen digitalnya. Sehingga naskah itu bisa tersimpan rapih dan tetap bisa dipelajari.

Pemerintah harus terus memperbaiki dan membangun sistem kearsipan yang baik untuk kepentingan anak cucu ke depan. Negara ini akan terus berdiri dan harapannya Indonesia akan semakin maju. Tentu harus ditunjang dengan pengelolaan arsip yang optimal.

Dukuhwidara

Komitmen Ciptakan Atlet Muda

Langkah konkret Pempdes Dukuhwidara dalam memberdayakan pemuda dapat terlihat dari banyaknya klub bola. Seperti apa?



Sebuah adagium terkenal “komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan baik”. Itulah yang saat ini tengah dilakukan Pempdes Dukuhwidara, Kecamatan Pabedilan.

Kepiawaian Pempdes dalam berkomunikasi dengan seluruh unsur masyarakat tak terkecuali pemuda dapat terlihat dari majunya sektor olahraga. Setiap blok di Desa Dukuhwidara tak absen memiliki klub sepak bola.

Kuwu Desa Dukuhwidara Syuhada mengatakan, peran pemuda yang aktif, didukung

penyuhada mengatakan, peran pemuda yang aktif, didukung penuh pemerintah desa. Banyak kegiatan positif dalam bidang keagamaan maupun olahraga. Tak heran Desa Dukuhwidara sering menorehkan prestasi dalam ajang sepak bola.

“Karena memang kami mendukung anak-anak muda yang tertarik di bidang olahraga. Kita sediakan lapangan yang bagus untuk latihan mereka dan kita dukung setiap ada pertandingan. Dan sekarang di desa saya ada 12 klub sepak bola,” ujar Syuhada.

Keaktifan dari pemuda tersebut, rencananya akan ditindak-

lanjuti dengan pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan prestasi. “Kita sudah pernah juara sepak bola tingkat kecamatan, kita tergetkan meningkat bisa juara kabupaten sampai provinsi,” tuturnya.

Apa yang dilakukannya bukan tanpa alasan. Pria yang hobi membaca tersebut menerangkan, kepala desa harus merespon terhadap suara masyarakat, khususnya generasi Z. Sehingga kedepan akan lahir masyarakat dengan SDM yang berkualitas.

“Kalau anak-anak muda kita berdayakan, sangat mungkin kedepan desa akan menjadi maju. Karena mereka yang akan meneruskan,” terangnya.

Meski demikian, Syuhada juga tak absen untuk meningkatkan sektor lain. Selain pemberdayaan kepemudaan, Syuhada telah merencanakan pengembangan ekonomi melalui zona khusus UMKM warga. Di sisi lain, Syuhada juga memastikan pembangunan infrastruktur pertanian yang dimotori Karang Taruna.

“Kalau UMKM dan pertanian itu hal yang pasti kita dorong. Karena mayoritas warga di sini berprofesi petani. Kita berharap langkah ini mendapat dukungan dari Pemkab dan Pemprov Jabar. Agar seluruh program kerja kami dapat terwujud,” pungkasnya. •Sharla

Ciuyah

Agar Panen Meningkatkan, Akses Jalan Tani Dibenahi

Biaya produksi panen meningkat karena rusaknya jalan tani, Pempdes Ciuyah prioritaskan perbaikan jalan tani. Kapan targetnya?

Mayoritas warga Desa Ciuyah, Kecamatan Waled, berprofesi sebagai petani. Sekitar 151 hektare lahan persawahan ditanami bawang merah, terong, cabai, dan padi. Meski demikian, adanya sumber daya alam (SDA) yang berlimpah belum didukung prasarana yang memadai. Mereka mengeluhkan kerusakan jalan tani yang menyebabkan biaya produksi menjadi mahal.

Hal itu pun dibenarkan Sekretaris Desa Ciuyah Sutara. Menurutnya akses jalan yang digunakan saat ini bisa memakan waktu 30 menit.

“Jalannya itu muter lewat Desa Ambit melewati Mekarsari, Karangsari, sampai Cibogo. Itu bisa memakan waktu setengah jam,” kata Sutara.

Oleh karenanya, Pemerintah Desa Ciuyah berencana memperbaiki akses jalan tani. Jalan ini akan membuat masyarakat lebih cepat menuju jalan utama Pabuaran-Sindang.

Sampai saat ini, akses jalan sudah tersedia dengan panjang 3,2 kilometer dan lebar 15 meter. Bahkan dia mengungkapkan sudah mengajukan proposal pada pemerintah daerah.

“Sebenarnya program ini sudah kami rencanakan sejak lama, bahkan 3 tahun yang lalu Bupati dan DPUTR sudah berkunjung



ke Ciuyah untuk memantau,” ungkap Sutara.

Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut bantuan perbaikan jalan. Namun, dia akan terus berupaya agar perbaikan jalan segera terealisasi dengan berkoordinasi ke berbagai lembaga.

“Selama ini kondisi jalan masih tanah, kalau musim hujan akan becek. Jika pembangunan jalan ini terlaksana, masyarakat hanya butuh 5 menit untuk menuju jalan utama Pabuaran - Sindang,” jelasnya.

Dia berharap pemerintah daerah akan bisa memproses program pembangunan akses jalan cepat di Desa Ciuyah. Jalan

mulus sangat dibutuhkan bagi laju perekonomian masyarakat. Selain itu, bila akses jalan yang baik maka secara otomatis akan menunjang program lainnya.

Sutara meyakini, jika jalan sudah dibangun, perekonomian masyarakat akan lebih meningkat. Berikut dengan pendapatan asli desa (PADes) yang akan ikut bertambah.

“Kalau akses jalan dibangun, program-program lain tentu bisa dilakukan. Seperti pemanfaatan sumber daya alam untuk dijadikan agrowisata, yang pada akhirnya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” pungkasnya. •par

Ciperna

Targetkan Perbaikan Sport Center

Gunawan menargetkan perbaikan sport center akan selesai di tahun mendatang. Apa keuntungannya?



Salah satu desa yang memiliki arena olahraga adalah Desa Ciperna, Kecamatan Talun yang berlokasi di selatan Cirebon.

Meski demikian, Pemdes Ciperna mengakui, keberadaan *sport center* tersebut belum memenuhi standar untuk digunakan ajang olahraga. Oleh karenanya, di tahun 2023 ini, mereka berencana untuk membenahi dan mengakselerasinya.

"Kita ingin mengoptimalkan fungsi *sport center* agar masyarakat yang menyukai olahraga bisa disalurkan. *Sport cen-*

ter itu merupakan peninggalan kuwu sebelumnya," ungkap Kuwu Desa Ciperna Gunawan.

Dengan adanya sarana dan prasarana olahraga yang memadai, diharapkan akan menumbuhkan semangat para atlet berlatih untuk mengharumkan nama Desa Ciperna dalam kancah olahraga.

Gunawan menjelaskan, perbaikan *sport center* menjadi upaya Pemdes Ciperna memberi ruang bagi generasi muda beraktivitas positif. Sejumlah sarana dan prasarana pun mulai dibangun. Dari jalan akses, perbaikan rumput, *jog-*

ging track, hingga lampu sorot.

"Untuk jalan sudah kita lakukan rabat beton sepanjang 250 meter dengan lebar 6 meter. Kalau lampu sorot akan segera kita pasang supaya aktivitas di lapangan bisa digunakan malam hari," jelasnya.

Selain itu, pembenahan *sport center* tak sekadar sebagai wahana menyalurkan hobi berolahraga, tetapi sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes) yang saat ini masih minim. Karenanya, potensi lahan seluas sekian hektare tersebut, akan ia optimalkan untuk membangun ikon wisata baru Desa Ciperna.

"Harapannya, ada potensi pendapatan yang bisa kita serap untuk pembangunan desa," terang Gunawan.

Gunawan berencana menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk mendirikan stand UMKM sekitar area olahraga. Sehingga tak hanya memberikan manfaat bagi desa melainkan juga masyarakat. Pria yang hobi memancing tersebut memastikan pembenahan *sport center* dapat diselesaikan pada 2024 mendatang.

"Kita sudah yakin di tahun 2024 nanti *sport center* ini akan segera beroperasi. Dulu sempat kita gunakan untuk kegiatan Liga Desa Nusantara dan terbukti meningkatkan ekonomi warga dan pendapatan desa. Semoga bisa terjadwal sesuai rencana," katanya. •Mir

Mulyasari

Irigasi Bersih, Pertanian Maju

Terobosan Pemdes Mulyasari dalam membangun desa patut diacungi jempol. Irigasi bebas sampah. Juga pertanian subur. Bagaimana bisa?



Belum genap dua tahun Abdun menjabat Kuwu Desa Mulyasari, Kecamatan Losari, namun telah banyak capaian program yang terealisasi. Juga inovasi yang dilakukan. Salah satunya berkaitan penanganan sampah. Tak ada sampah yang berserakan di irigasi maupun pinggir jalan, karena rutin diangkut oleh satgas sampah bentukan Pemdes Mulyasari.

Pada setiap sekat irigasi, Pemdes Mulyasari mengisi benih dan bibit ikan lele. Bukan tanpa tujuan, selain untuk mencegah menumpuknya sampah, budidaya lele tersebut merupakan salah satu langkah mencegah penyakit demam berdarah.

"Akan tetapi, masyarakat tidak menganggapnya demikian. Ikan lele yang disebar mereka pancing. Memang ada masanya panen dan dimanfaatkan bersama. Namun ada saja masyarakat yang ngeyel dan mengambil lele-lele tersebut untuk mereka konsumsi," ujar pemilik nama lengkap Abdun Darmad.

Pemdes mengakui, kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi. Dalam waktu dekat, mereka akan memperbaikinya. Mengingat sebentar lagi akan menyambut HUT kemerdekaan RI.

Selain berhasil mengatasi sampah, keunggulan lainnya adalah hasil pertanian. Para warga yang mayoritas petani tak perlu bingung saat akan men-

jual hasil panen, karena Pemdes Mulyasari telah menyediakan Koperasi Unit Desa (KUD).

Suburnya pertanian di desa ini, tak lepas dari campur tangan desa yang berhasil memfasilitasi pompa air sehingga perairan di sawah sangat baik. Bahkan diakui, desa lain pun terbantu. "Pengairan di sawah kita sangat baik, sehingga dari desa lain pun seperti Kalirahayu, ambil airnya dari sini," ungkap Abdun.

Dalam waktu dekat, Pemdes

Mulyasari berencana memanfaatkan lahan pertanian sebagai destinasi wisata *spot selfie* dan membuat pendopo.

"Kita menyebutnya wisata sawah jalan cinta. Sebenarnya sudah mulai saya bangun tapi belum matang. Semoga dalam waktu dekat revitalisasi wisata jalan cinta ini bisa segera kita eksekusi. Sementara ini, lahan tersebut baru dimanfaatkan untuk jualan angkringan anak muda di sini," katanya. •Sharla

Mohamad Luthfi



Mantan

ni bukan sembarang mantan. Istimewa, saya menganggapnya begitu. Meski mantan, dia tetap penting sepanjang zaman. Bahkan, tanpanya eksistensi pemerintahan, atau negara bisa terancam.

Dari sisi tertentu, arsip bisa disebut mantan. Bahkan, barang bekas. Seperti umumnya mantan, ia sering dilupakan, kurang menarik, dan --dalam perspektif para pencari proyek-- kurang menguntungkan, bukan lahan basah.

Wajar, bila aparatur yang ditempatkan di situ dianggap sebagai orang terbuang. Anehnya lagi, hal itu juga menancap di alam bawah sadar top manajemen. Para pejabat 'menghukum' aparatur 'bandel' dengan ditempatkan di institusi kearsipan. Jadilah, semakin kuat persepsi keliru itu: sebagai lembaga buangan.

Richardo J. Alfaro, pegiat arsip, mantan Presiden Panama, dengan lantang membantah hal itu. Ia berkata: "Pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, dan tukang tanpa alat."

Sebegitu vitalnya peran pengelolaan arsip kok disebut 'buangan'. Harusnya sebaliknya, memiliki kebanggaan berlipat. Pasalnya, diberi amanah menghidupkan jantung eksistensi negara, terutama aspek legal atau hukum.

Selain persoalan legalitas, arsip berfungsi sebagai pelestari sejarah. Ia mencatat peristiwa, sehingga perjalanan hukum, budaya, politik, dan sosial dapat dihargai dan dipelajari.

Keberadaan arsip memastikan bahwa kita dapat belajar dari masa lalu; menjaga fungsi pemerintahan; mendukung pengambilan keputusan; melestarikan warisan budaya; dan menyelidiki berbagai aspek kehidupan rekam jejak manusia.

Sepanjang waktu diskursus kearsipan selalu berputar tentang media penyimpanan. Dulu mulai dari media gambar, kemudian video, dan kini ramai penyimpanan digital. Jika kini kita masih bertanya kapan arsip kita disimpan secara digital? Maka bisa

dipastikan pertanyaan itu sudah ketinggalan zaman.

Pertama, era *artificial intelligence* (AI) harusnya digitalisasi sudah selesai. Karena pengelolaan arsip secara AI mensyaratkan arsip sudah dikelola secara digital. Jika, hari ini Kabupaten Cirebon masih debat kapan digitalisasi, maka halooo...engkau hidup di zaman apa sih?

Kedua, idealnya diskusi hari ini bukan lagi soal arsip disimpan dengan media apa? Tapi bagaimana penyimpanan itu dikemas menjadi seperti 'mesin waktu'. Baik digitalisasi maupun AI arsip harus disajikan dengan kemampuan membawa seseorang ke dalam mesin waktu.

Mesin itu mampu menghanyutkan seseorang ke waktu ketika arsip itu diproduksi hingga perjalanannya sampai ke masa kini. Artinya arsip bukan hanya disimpan begitu saja. Tapi penyimpanan itu mampu menyertakan ruh dan semangat zaman sang arsip.

Dengan kesadaran ini kami mengajak semua aparatur negara jangan sungkan (apalagi mengabaikan) pengarsipan. Tak ada lagi cerita arsip penting berhias kotoran cecak dan tikus tergolek pasrah di toilet bekas di pojok belakang kantor.

Berjuanglah melestarikannya, sebagaimana para pejuang melahirkan negara ini. Bersemangatlah seperti halnya ketika engkau bersemangat melahirkan dokumen yang kini disebut arsip itu.

Ke depan, tak perlu lagi memberikan anggaran besar (cukup) untuk mengelola arsip. Pengelolaan arsip bukan beban (*cost*), tapi *investment*. Investasi yang menjamin keberlangsungan hidup kita, dan melahirkan generasi pembelajar yang andal. Generasi yang pada gilirannya meneruskan kejayaan negeri ini.

Jadi, jangan biarkan peristiwa penting hilang dari catatan sejarah. Jangan pula membiarkan ruh, semangat, perjuangan, air mata, dan cinta terlepas dari catatan sejarah itu. Cukup *mantan* (pacar) saja yang menjadi sejarah yang tak tercatat.



SEKRETARIS DPRD
DAN SELURUH PEGAWAI

Mengucapkan

Selamat
Tahun Baru
Islam

1 Muharram 1445 H



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Selamat

Tahun Baru

Islam

1 Muharram 1445 H

